

ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Oleh :

Rusita Untari

B12. 2011.01972

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Dian Nuswantoro

Email : 212201101972@mhs.dinus.ac.id

ABSTRACT

Public sector organizations are required to consider the value for money in running their activities. The objectives required by the society are the accountability of the realization of the value for money which is economists in the provision of the resource a location, efficient in the use of the resources meaning to minimize the use of resources and to maximize the outcome, and effective in achieving the objectives and goals. This research is conducted in Education office of Semarang. This research aims to analyze the rate of efficiency and effectiveness of the implementation and realization of the direct budget in Education office of Semarang in 2011 to 2014. The method used in this research is descriptive analysis using the ratio of efficiency and effectiveness.

Since 2011 to 2014, the direct budget in Education office of Semarang has been implemented efficiently meaning the budget was minimized in order to achieve more benefits in every projects of the direct budget in Education office of Semarang (spending well). Regarding to the rate of effectiveness, in 2011 to 2014, the Education office of Semarang has succsesfully implemented the direct budget. The Education office of Semarang has successfully implemented the projects and programs related to the direct budget in accordance with the expectation and it gives benefit to increase the quality of education in Semarang.

Keywords : efficiency, effectiveness and direct budget realization.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga – lembaga pemerintahan di Indonesia dan departemen – departemen dibawahnya dengan tujuan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pada saat ini sektor publik dituntut untuk memperhatikan kualitas dan profesionalisme serta memperhatikan *value for money*.

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokrasi menjadi satu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokrasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Mahmudi (2009) mengatakan bahwa Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang berkaitan dengan pengguna sumber daya publik kepada pemberi mandat.

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. Yang dimaksud *value for money* adalah ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan penggunaan sumber daya alam, artinya bahwa penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing cost*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Setiap tahun anggaran yang menjadi masalah rutin dalam anggaran adalah rendahnya daya serap anggaran. Dalam nota keuangan dan RAPBN 2014 disebutkan bahwa daya serap anggaran belanja kementerian dan lembaga dalam rata-rata hanya 87% dari penggunaan anggaran yang ditetapkan APBN setiap tahun. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan daerah BPKP mengatakan bahwa penyerapan dana tidak efektif tercermin dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Di Indonesia rata-rata SILPA di Pemerintah Daerah pertahunnya melebihi Rp 50 Trilyun. Jumlah SILPA yang besar tersebut terjadi bukan karena semata mata efisiensi pengelolaan belanja daerah tetapi lebih menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum efektif di dalamnya, salah satunya ada program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan (www.bpkp.go.id).

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis tingkat Efektifitas dan Efisiensi pada pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung periode 2011- 2014 di SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Bastian (2006) mengatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta. Menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan akuntansi adalah proses, identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya (www.djpk.depkeu.go.id).

Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan basis akuntansi (pasal 1 ayat 8-9) terbagi atas : SAP yang mengakui pendapatan beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBN/APBD. SAP berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui asset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Dan basis akrual (*accrual basis*) sendiri Menurut Halim (2012), adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar).

Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2009) mengatakan anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktifitas. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktifitas dalam satuan moneter.

Laporan Realisasi Anggaran

Menurut PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintahan pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD

Dalam Permendagri No.13 tahun 2006, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember. Halim (2012) juga mengatakan APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran.

Kedudukan Belanja Daerah Dalam APBD

Kedudukan belanja dalam APBD yaitu:

1. Merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran serta berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas aktifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran yang dimaksud.
3. Penyusunan belanja diprioritaskan untuk menjunjung efektifitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawab (DJPk, 2013).

Konsep Belanja Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan SAP menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah. Definisi lain berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri no.59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan peraturan Menteri dalam Negeri N0.21 tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi :

1. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan.

Belanja langsung terdiri atas Belanja :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal.

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja bunga
- c. Belanja hibah
- d. Belanja subsidi
- e. Belanja bantuan sosial.
- f. Belanja bagi hasil kepada provinsi / kabupaten/kota dan pemerintah desa

Belanja Langsung

Menurut Mahmudi (2007) belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan kegiatan (aktifitas).

Belanja Langsung Menurut Jenis Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas dari belanja pegawai yang dimaksudkan dengan pengeluaran honorarium / upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah seperti belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa .

1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang atau personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
2. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja modal merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan .

Efisiensi Belanja Langsung

Mardiasmo (2009), efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. Mahmudi (2007) mengatakan bahwa efisiensi adalah analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja.

Efektifitas Belanja Langsung

Menurut Mardiasmo (2009) efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna), dan efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Mahmudi (2007) mengatakan efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai, dan efektifitas adalah hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektifitas lebih menekankan pada hasil yang dicapai.

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif yaitu data yang dapat diukur dalam suatu skala numerik atau angka-angka. Yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga secara berkala untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu.

Objek Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Khususnya di Dinas pendidikan Kota Semarang yang beralamat di Jalan Dr.wahidin No 118 kecamatan Candisari Kota Semarang. Pengumpulan data penelitian pada Dinas Pendidikan Kota Semarang bagian Perencanaan.

Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data tersebut langkah yang dilakukan peneliti dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dokumenter dari perangkat kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang, yaitu bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Sugiyono (2009) mengatakan bahwa analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan total anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{OUTPUT}}{\text{INPUT}} \times 100\%$$

Sumber : (Mahmudi, 2007)

Dalam rumus diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud *output* dalam penelitian ini yaitu Target anggaran belanja langsung dan *input* adalah Anggaran belanja langsung. Berikut adalah kriteria hasil perhitungan dari efisiensi belanja langsung :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan target anggaran belanja langsung.

$$\text{EFEKTIFITAS} = \frac{\text{OUTCOME}}{\text{OUTPUT}} \times 100\%$$

Sumber : (Mahmudi, 2007)

Berdasarkan rumus diatas dapat dijelaskan bahwa yg dimaksud *outcome* dalam penelitian ini adalah Realisasi Anggaran Belanja langsung dan *output* adalah Target Anggaran belanja langsung. Berikut kriteria efisiensi belanja langsung :

Keputusan menteri dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif
2. Jika pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif
5. Jika pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Efisiensi Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang

Tabel 4.2

Tingkat Efisiensi Belanja Langsung (dalam rupiah)

Tahun	Target Anggaran Belanja Langsung (<i>output</i>)	Anggaran Belanja langsung (<i>input</i>)	Tingkat efisiensi (%)	Keterangan
2011	77.548.859.919.6	167.469.112.700	46.3	Sangat Efisien
2012	86.093.329.911	186.076.803.000	46.2	Sangat Efisien
2013	31.256.728.057	309.664.171.000	10.1	Sangat Efisien
2014	123.362.570.361	172.165.820.000	71.6	Efisien
Rata – rata			43.5	

Sumber : Laporan realisasi anggaran belanja langsung

Analisis Efektifitas Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang

Tabel 4.6

Tingkat Efektifitas Belanja Langsung (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Langsung (<i>outcome</i>)	Target Anggaran Belanja Langsung (<i>output</i>)	Tingkat Efektifitas (%)	Keterangan
2011	76.673.167.356.6	77.548.859.919.6	98.87	Efektif
2012	85.192.408.174	86.093.329.911	98.95	Efektif
2013	29.655.649.386	31.256.728.057	94.87	Efektif
2014	121.230.431.265	123.362.570.361	98.27	Efektif
Rata – rata			97.74	

Sumber : Laporan realisasi anggaran

Pembahasan

1. Dalam tabel 4.2 terlihat bahwa selama empat tahun rata – rata tingkat efisiensi belanja langsung sebesar 43.5 %. Pada tahun 2011 hasil perhitungan tingkat efisiensi sebesar 46.3 % dan ditahun 2012 sebesar 46.2 %, dari hasil kedua tahun tersebut bahwa Dinas Pendidikan kota Semarang dalam melaksanakan belanja langsung dikategorikan sangat efisien. Tahun 2013 tingkat efisiensi belanja langsung sebesar 10.6 % dengan kategori sangat efisien. Dari ke tiga tahun diatas bahwa dinas pendidikan kota semarang dalam melaksanakan belanja langsung sangat efisien. Dari ke tiga tahun diatas hasil tingkat efisiensi dibawah rata – rata dan paling efisien adalah tahun 2013, karena ditahun ini terjadi selisih yang sangat jauh antara anggaran dengan target anggaran dan diperjelas dengan adanya program dan kegiatan yang dikurangi dan tidak dijalankan yaitu Pengadaan Alat IPA SMP 28 kegiatan tersebut tidak dijalankan karena sudah dijalankan dan dianggap tidak perlu dijalankan lagi ditahun 2013 ini. Dapat dikatakan bahwa dinas pendidikan kota semarang pada tahun tersebut telah meminimalkan anggaran dengan harapan hasil yang maksimal. Namun di tahun 2014 tingkat efisiensi sebesar 71.6 % dengan kategori efisien. Di tahun 2014 kategori tingkat efisiensi berbeda pada tahun – tahun sebelumnya tetapi masih dalam kategori efisien. Karena di tahun ini dinas pendidikan kota semarang meminimalkan anggarannya sedikit dan selisih anggaran dengan target tidak terlalu jauh. Dari empat tahun tersebut terjadi perubahan pada hasil perhitungan tingkat efisiensi pada setiap tahunnya. Hal tersebut terjadi karena pada setiap tahunnya pemangkasan anggaran pada setiap program dan kegiatan berbeda – beda. Dengan rata – rata sebesar 43.5 % bahwa dinas pendidikan dalam melaksanakan belanja langsung selama periode 2011 – 2014 sudah sangat efisien dan Dinas Pendidikan Kota semarang sudah melaksanakan belanja langsung dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sedikit tetapi manfaat yang didapat sangat besar.
2. Dari tabel 4.6 diatas bahwa belanja langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang selama periode 2011 – 2014 rata – rata tingkat efektifitasnya sebesar 97.74%. Pada tahun 2011 ini semua program dan kegiatan ditahun ini sudah dijalankan semua dan hasil analisis tingkat efektifitas pada pelaksanaan belanja langsung tahun 2011 sebesar 98.87% dengan kategori efektif. Berikut contoh progan atau kegiatan yang sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2011 :

Tabel 4.6.1

Program dan Kegiatan dalam Belanja Langsung yang dijalankan

No.	Program atau Kegiatan yang dijalankan
1.	Pengadaan Peralatan Lab computer SMP 8
2.	Rehabilitasi SMK 1
3.	Pembangunan Ruang SMK 3
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.	Penyediaan jasa perlengkapan dan peralatan kantor
6.	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
7.	Pendampingan Bos SMP 2
8.	Pendampingan Bos SMP 5
9.	Pendampingan Bos UPTD Kec. Ngaliyan
10.	Pendampingan Bos UPTD Kec. Pedurungan

pencapaian tahun 2012 pada hasil analisis tingkat efektifitas sebesar 98.95 % dengan kategori efektif, karena ditahun ini pencapaian dari masing – masing program atau kegiatan yang sudah dijalankan sesuai yang diharapkan dan terlihat dari selisih antaran target dengan realisasinya dalam belanja langsung tidak terlalu jauh dan diperjelas dengan beberapa contoh program atau kegiatan yang sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2012 :

Tabel 4.6.2

Program atau Kegiatan yang dijalankan pada tahun 2012

No.	Program atau Kegiatan yang dijalankan
1.	Operasional UPTD TU SMKN 4
2.	Operasional UPTD TU SMKN 5
3.	Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor
4.	Pengadaan Alat Lab IPA SMPN23
5.	DAK SMP
6.	DAK SD
7.	Pendampingan BOS SMP N 15

Kemudian di tahun 2013 tingkat efektifitas turun menjadi 94.87 % meskipun turun tingkat efektifitasnya di tahun tersebut, tetapi pencapaian dalam belanja langsung masih dalam kategori efektif sama dengan tahun – tahun sebelumnya. Di tahun 2014 tingkat efektifitasnya sebesar 98.27% hasil tersebut naik dari tahun 2013 dengan kategorikan efektif dan ditahun 2014 ini berbeda dengan tahun 2013 karena banyak program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2014 sebagai contohnya ada beberapa program atau kegiatan yang sudah dijalankan dalam tahun 2014 ini :

Tabel 4.6.3

Program atau Kegiatan yang dijalankan dalam belanja langsung Tahun 2014

No.	Program atau Kegiatan yang dijalankan
1.	Penyelenggaraan Gebyar Paud
2.	Pendampingan BOS SMAN 13
3.	Pendampingan BOS SMAN 14
4.	Rehabilitasi Gedung SMAN 2
5.	Rehabilitasi dan Pembangunan Sarana dan Prasarana SMA N 14
6.	Pengadaan Alat Bengkel SMK 4
7.	Inpassing Jabatan Guru
8.	Seleksi calon pengawas dan penilik

Namun dari tahun 2011 – 2014 tingkat efektifitas yang paling rendah dan dibawah rata – rata tingkat efektifitas dalam belanja langsung terjadi pada tahun 2013, karena ditahun ini banyak program dan kegiatan yang tidak dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Sebagai contoh ada delapan Program dan kegiatan yang tidak dijalankan yaitu :

Tabel 4.6.4

Program dan Kegiatan dalam Belanja Langsung yang Tidak dijalankan Tahun 2013

No.	Program atau Kegiatan yang Tidak dijalankan
1.	Rehabilitasi Gedung SMPN 19
2.	Rehabilitasi Gedung SMP N 23
3.	Pengadaan Bahan Praktik SMK N 1
4.	Pengadaan Bahan Praktik SMK N 2
5.	Pengadaan Bahan Praktik SMK N 3
6.	Workshop Mapel UN SMA / SMK
7.	Kursus Kewieusahaan Desa (KWD)
8.	Manajemen Pendataan Pendidikan

Dari delapan contoh kegiatan yang tidak dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang karena kegiatan – kegiatan tersebut tidak perlu dijalankan di tahun 2013 dan sudah dijalankan pada tahun – tahun sebelumnya ada juga yang kegiatannya tidak dijalankan karena ada peraturan terbaru dari pemerintah pusat atau tidak dijalankan karena pelaksanaan dari kegiatan dalam belanja langsung waktunya tidak mencukupi sehingga tidak dijalankan ditahun 2013 akan dianggarkan kembali di tahun 2014 dan kurangnya sosialisasi dan asistensi secara intensif kepada pelaksanaan kegiatan sehingga lebih cermat dalam penggunaan kode rekening. Secara keseluruhan bahwa dinas pendidikan kota semarang sudah melaksanakan program dan kegiatan dalam belanja langsung dengan hasil yang efektif dengan rata – rata pencapaian dari empat tahun tersebut sebesar 97.74 %. Hasil perhitungan pada tingkat efektifitas pada belanja langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang setiap tahunnya pencapaiannya berbeda – beda karena dalam setiap tahunnya pencapaian dari masing-masing kegiatan tidak selalu sama meskipun jenis programnya sama dan ada beberapa program yang tidak dijalankan di setiap tahunnya sehingga ada perubahan di pencapaian program tersebut sehingga mengakibatkan hasil perhitungan dari tingkat efektifitas berbeda – beda dalam setiap tahunnya

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan oleh peneliti sebagai berikut :

- 1) Dalam belanja langsung tingkat efisiensi dari tahun 2011 – 2014 sudah efisien dalam penggunaan dana (Anggaran) yang rendah dengan harapan pada setiap program dan kegiatan yang dijalankankan dapat bermanfaat semakin baik (*spending well*).
- 2) Pencapaian Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam tingkat efektifitas pada tahun 2011 – 2014 sudah dikategorikan efektif dalam melaksanakan program dan kegiatan pada belanja tersebut.

Saran

Berdasarkan pada hasil analisa dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

- 1) Bagi Dinas Pendidikan Perlu meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan anggaran belanja langsung ditahun – tahun selanjutnya, agar pencapaian kegiatan dan program dari tahun ketahun sesuai yang diharapkan dan mencapai tujuan.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, agar menjadi acuan dan peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti anggaran belanja langsung setiap tahun dan meneliti tentang proses jalannya program kegiatan dan program kerja anggaran belanja yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra.2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta:Erlangga.
- Basri,Ramlan.2013.”Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara”.*Jurnal Emba ISSN 2304 – 1174*.Vol.2, No.3, Hal. 952-961.
- Bisma,Dewa dan Susanto.2010.”Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat”.*Ganec Swara*. Vol.4, No.3.
- Ekawarna.2009.”Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi”. *Jurnal Cakrawala Akuntansi* . Vol.1, No.1, Hal.49-66.
- Fahrianta, Riswan dan Carolina.2012.”Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas”.*Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol.13, No.1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Banjarmasin.
- Halim, Abdul dan Kusufi.2012.*Akuntansi Keuangan Daerah*.Edisi4.Jakarta:Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Supomo.2002.*Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*,Edisi Pertama, Cetakan kedua . Yogyakarta:BPFE.
- Ikatan Akuntan Indonesia.2009.*PSAK No.1 (Revisi 2009)*. Jakarta:Salemba Empat
<http://staf.blog.ui.ac.id> akses 6April 2015.
- Lomboan, Syurtika, dan Venje.2014.”Analisis Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal Emba ISSN 2304 – 1174*. Vol 2, No.3, Hal.952-961.
- Mardiasmo.2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mahmudi.2007.*Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta:YKPN.
- Nordiawan,deddi dan Ayuningtyas.2010.*Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia.2006.”Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13”.*Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. <http://kumoro.staf.ugm.ac.id>. akses 15 April 2015.

- Pemerintah Republik Indonesia.2006."Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26".*Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.Jakarta. www.bkkbn.go.id . akses 17 April 2015.
- Pemerintah Republik Indonesia.2010."Peraturan Pemerintah Nomor 71".*Standar Akuntansi Pemerintahan*.Jakarta. www.djpk.depkeu.go.id akses 17 April 2015.
- Pemerintah Kota Semarang. 2015. " Struktur organisasi, Visi dan Misi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang".Semarang. www.disdik.semarangkota.go.id . Akses 28 Juli 2015.
- Sumenge, Ariel.2013."Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja.*Jurna Emba ISSN 2304 – 1174*.Vol.1, No.3, Hal. 74-81.